

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Jadi Temuan BPK, Hibah Alat Kesenian Dibatalkan
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Senin, 15 Oktober 2018

Jadi Temuan BPK, Hibah Alat Kesenian Dibatalkan

SOREANG, (PR).-

Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Bandung mengaku kecewa dengan pembatalan hibah bantuan alat kesenian yang sedianya sudah direalisasikan sejak beberapa bulan lalu.

Alih-laih mendapatkan bantuan, mereka kini kebingungan menjelaskan kepada para calon penerima, setelah menerima surat resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung terkait pembatalan bantuan tersebut.

Kades Mekarsari Kecamatan Pasirjambu Ferry Januar mengaku kecewa atas pembatalan itu. "Setelah digantung lama, kami malah menerima surat pemberitahuan bahwa bantuan alat kesenian dibatalkan," katanya, Minggu (13/10/2018).

Surat itu ditandatangani Kepala Disparbud Kabupaten Bandung Agus Firman Zaini pada 14 Agustus 2018. "Namun kami baru menerima surat itu dari kecamatan 2 Oktober 2018," ujar Ferry.

Kekecewaan serupa diungkapkan Kepala Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Suhendar. "Kalau tahu

akan seperti ini, kami sejak dulu menganggarkan saja dari desa. Sekarang saya malu oleh masyarakat yang sudah dijanjikan akan menerima," ujarnya.

Kepala Disparbud Kabupaten Bandung Agus Firman Zaini masih belum bisa dihubungi untuk dimintai klarifikasi terkait masalah ini. Namun, Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Bandung M Dani membenarkan pembatalan itu.

"Itu bukan pembatalan anggaran. Untuk bantuan alat kesenian 2016-2017 sudah direalisasikan Rp 2,7 miliar, tetapi laporannya belum tertib administrasi. Jadi pada 2017-2018 ada pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar tidak direalisasikan," tutur Dani.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat tak menampik jika pembatalan program itu disebabkan temuan BPK dan inspektorat tentang tidak sesuai calon penerima dan calon lokasi pada program serupa tahun lalu. "Itu dibatalkan bukan oleh dewan tetapi Disparbud," **(Handri Handri-ansyah)*****